

TINGKAT KEBERDAYAAN PETANI SAWIT POLA SWADAYA DI PROPINSI RIAU

Rosnita¹, Roza Yulida¹, Suardi Tarumum¹ dan Arifudin¹

¹ Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

ABSTRACT

The empowerment of human resources, economics, and institutional self-supporting farmers, so it is able to produce better farming, better business, and better living. This study aims to determine the level of self-empowerment of farmers in the cultivation of oil palm in Riau Province. This study was used eksplanans research that it is intended to discover and develop the theory. Whereas sampling was also chosen by disproporsional stratified random sampling. A total of 180 non-farmers will be taken as samples in consideration of the number of farmers and the existence of non-existing extension services in three districts in Riau Province: Kampar, Rohul, and Indragiri Hilir. To answer the first and second objectives using Likert Scale's Summated Rating (SLR). The results showed that: (1) The role of smallholders penyuluhan for non-categorized quite instrumental patterns, (2) Empowerment peasant farmers categorized well.

Keywords : *The empowerment, farmers of oil palm in Riau Province*

PENDAHULUAN

Tipologi perkebunan rakyat dapat dibagi kedalam dua bentuk, yakni kebun petani plasma yang menjadi mitra bagi perusahaan negara maupun swasta dan kebun rakyat yang dimiliki masyarakat secara swadaya. Namun demikian, hasil produksi kelapa sawit petani plasma lebih baik dibandingkan petani swadaya dikarenakan manajemen agribisnis dari input, proses, dan output berjalan dengan baik pada petani plasma. Berbeda dengan petani swadaya yang belum dapat memenuhi produksi optimum kebun kelapa sawit. Data Statistik Perkebunan Propinsi Riau tahun 2012 menunjukkan bahwa luas lahan dan produksi perkebunan sawit rakyat dengan perusahaan negara dan swasta tidak berbanding lurus, dimana perkebunan rakyat lebih luas namun hasilnya tidak sebesar perkebunan swasta dan negara

Produksi optimal dari perkebunan kelapa swadaya perhektar bila menggunakan bibit unggul sawit bisa mencapai 30 ton TBS/ha/tahun. Namun dalam kenyataannya perkebunan rakyat yang diusahakan secara swadaya hanya mencapai 16 ton TBS (Kuswanto, 2008). Untuk itu, dalam membudidayakan tanaman kelapa sawit faktor-faktor produksi yang baik sangat dibutuhkan seperti pada tahap persiapan yang meliputi: penyiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan sampai kepada pemasaran. Isu lain yang sangat perlu diperhatikan pada petani swadaya adalah *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Pemenuhan standar RSPO menuntut petani semakin memperbaiki kualitas perkebunan kelapa sawit yang mereka miliki.

Oleh karena itu pemberdayaan terhadap petani sawit pola swadaya menjadi sangat perlu diperhatikan, mengingat keberdayaan petani sawit swadaya ini akan ikut menentukan masa depan kelestarian kelapa sawit. Dengan demikian

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013

halaman 241

memunculkan pertanyaan bagaimana tingkat keberdayaan petani swadaya dalam kegiatan usahatani kelapa sawit di Provinsi Riau? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat keberdayaan petani swadaya dalam kegiatan budidaya kelapa sawit di Provinsi Riau.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode ekplanasi yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan teori, sehingga hasil atau produk penelitiannya dapat menjelaskan kenapa atau mengapa terjadinya suatu gejala atau kenyataan sosial tertentu. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan survey, pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan karakter tertentu dari suatu populasi yang berkenaan dengan dengan sikap dan tingkah laku (Faisal. 2005). Dalam penelitian ini pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan lokasi tersebut berdasarkan jumlah petani sawit swadaya terbanyak pada urutan 1, 2 dan 3 ada pada ketiga kabupaten tersebut secara berurutan. Dalam penentuan responden digunakan key informan dan sampel. Untuk menjawab tujuan menggunakan Skala Likert's Summated Rating (SLR).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumodiningrat (1999) mengartikan keberdayaan masyarakat sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat dengan keberdayaan yang tinggi, adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat dan memiliki nilai-nilai instrinsik yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti sifat-sifat kekeluargaan, kegotong-royongan, dan (khusus bagi bangsa Indonesia) adalah keragaman atau kebinekaan (Mardikanto, 2009). Pada penelitian ini keberdayaan petani kelapa sawit pola swadaya dilihat dari tiga aspek yaitu (1) sumberdaya manusia (SDM); (2) ekonomi produktif; dan (3) kelembagaan.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yaitu kemampuan memanfaatkan potensi diri dan lingkungan yang disesuaikan dengan potensi sosial budaya masyarakat pertanian. Pemberdayaan sumber daya manusia, dimana manusia sebagai masukan lingkungan diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan melalui proses peningkatan kualitas SDM sehingga menghasilkan keluaran yang mampu menguasai teknologi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang mampu memberdayakan ekonomi produktifnya secara berkelanjutan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Rosnita, 2011).

Tabel 1 menerangkan bahwa nilai skor yang diperoleh dari variabel sumber daya manusia mendapatkan skor 3,46 dengan kategori "baik". Hal ini menunjukkan bahwa keberdayaan petani dilihat dari sumber daya manusia di daerah penelitian telah mengalami peningkatan. Variabel sumber daya manusia di atas dinilai dari beberapa indikator yaitu indikator pengetahuan yang lebih baik dari kegiatan penyuluhan, peningkatan kompetensi dan kualitas petani, dan membuat pembukuan RDK usaha tani untuk pengeluaran & pemasukan. Untuk indikator pengetahuan yang lebih baik dari kegiatan penyuluhan mendapatkan

Disampaikan pada Seminar Nasional "*Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan*", November 2013

skor 3,71 dengan kategori “baik” ini karena petani di daerah penelitian telah mengalami peningkatan pengetahuan yang sangat pesat. Perkembangan SDM petani tidak terjadi begitu saja, petani telah mengikuti penyuluhan sejak tahun 1990-an. Saat itu petani masih menggunakan lahan mereka untuk bertanam padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya. Kemudian di tahun 2000-an kelapa sawit mulai dikenal sebagai tanaman perkebunan yang menjanjikan sehingga banyak petani mengkonversi lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan perkebunan hingga saat ini. Konversi lahan ini menandakan petani telah mengalami perkembangan pengetahuan (SDM) dalam pemilihan tanaman pertanian yang memiliki nilai komersial lebih menjanjikan.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Sumber Daya Manusia (Y1)	Rata-rata	Kategori
1	Pengetahuan yang lebih baik melalui kegiatan penyuluhan	3,71	Baik (B)
2	Peningkatan kompetensi & kualitas petani	3,30	Cukup Baik(C)
3	Membuat pembukuan RDK usaha tani untuk pengeluaran & pemasukan	3,38	Cukup Baik(C)
Sumber Daya Manusia (Y1)		3,46	Berperan (B)

Sumber : Data Olahan, 2013

Indikator peningkatan kompetensi & kualitas petani mendapatkan skor 3,30 dengan kategori “cukup baik”, peningkatan tersebut yaitu kemampuan petani dalam menerapkan lima subsistem agribisnis (subsistem agribisnis hulu/pengadaan input produksi (*off-farm*), subsistem produksi (*on-farm*), subsistem agroindustri, subsistem pemasaran hasil produksi, dan subsistem lembaga penunjang (koperasi, pemerintah, bank, dll)). Dari kelima subsistem agribisnis petani mengalami kesulitan pada subsistem pemasaran hasil produksi, petani masih kesulitan memasarkan hasil produksi kelapa sawit dan hasil pertanian lainnya. Kelangkaan pupuk juga menjadi masalah bagi petani.

Indikator membuat pembukuan RDK usaha tani untuk pengeluaran & pemasukan mendapatkan skor 3,38 dengan kategori ” cukup baik”, dalam hal ini petani telah mencatat pembukuan pengeluaran dan pemasukan, namun tidak rinci. Namun pada hal ini petani lebih sering mencatat pengeluaran dari pada pemasukan, padahal untuk mengetahui apakah pengeluaran dan pemasukan seimbang petani harus mencatat keduanya sehingga dapat dievaluasi bagian mana yang perlu dibenahi.

Ekonomi Produktif

Ekonomi Produktif yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang diusahakan baik secara individu maupun kelompok, dan mampu mengolah modal usaha untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Pendekatan ekonomi produktif lebih menekankan pada partisipasi aktif masyarakat untuk memecahkan, merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan secara individu ataupun bersama dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi produktif masyarakat (Rosnita, 2011).

Disampaikan pada Seminar Nasional “Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan”, November 2013

Pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat menciptakan usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mampu memandirikan masyarakat dan desa. Sehingga program ini diharapkan dapat mengangkat masyarakat desa dari keterpurukannya.

Tabel 2. Ekonomi produktif

No	Ekonomi Produktif (Y2)	Rata-rata	Kategori
1	Peningkatan skala usaha dengan adanya kegiatan penyuluhan	3,51	Baik (B)
2	Peningkatan pendapatan rumah tangga petani	3,44	Baik (B)
3	Peningkatan pengeluaran rumah tangga non-pangan per bulan	3,49	Baik (B)
4	Pemenuhan 14 kebutuhan dasar rumah tangga	4,17	Baik (B)
Ekonomi Produktif (Y2)		3,65	Berperan

Sumber : Data Olahan, 2013

Tabel 2 menerangkan bahwa nilai skor yang diperoleh dari variabel ekonomi produktif mendapatkan skor 3,65 dengan kategori “baik”. Hal ini menunjukkan bahwa keberdayaan petani dilihat dari ekonomi produktif di daerah penelitian telah mengalami peningkatan. Variabel ekonomi produktif di atas dinilai dari beberapa indikator yaitu peningkatan skala usaha dengan adanya kegiatan penyuluhan, peningkatan pendapatan rumah tangga petani, peningkatan pengeluaran rumah tangga non-pangan per bulan, dan pemenuhan 14 kebutuhan dasar. Untuk indikator peningkatan skala usaha dengan adanya kegiatan penyuluhan mendapatkan skor 3,51 dengan kategori “baik”. Skor ini menjelaskan keberdayaan petani dilihat dari peningkatan skala usaha mengalami peningkatan antara 51%-75%. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari penambahan aset yang dimiliki petani seperti tanah, usaha budidaya ikan air kolam, membuka dan warung harian. Namun kaum perempuan disini masih kurang berperan, karena program MKRPL (Model Keanekaragaman Rumah Pangan Lestari) belum efektif berjalan. Seharusnya dengan program ini penyuluh mampu memberdayakan kaum perempuan untuk mengisi kekosongan waktu mereka seperti memanfaatkan lahan pekarangan dengan tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan atau dengan mengajarkan mereka kerajinan tangan dari bahan-bahan bekas sehingga memiliki nilai jual yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.

Indikator peningkatan pendapatan rumah tangga petani mendapatkan skor 3,44 dengan kategori “baik”. Skor ini menjelaskan keberdayaan dilihat dari peningkatan pendapatan rumah tangga petani mengalami peningkatan 51%-75%. Peningkatan pendapatan petani umumnya didominasi dari usaha tani kelapa sawit, sementara usaha lainnya kurang memiliki pengaruh yang signifikan.

Indikator pengeluaran rumah tangga non-pangan per bulan mendapatkan skor 3,49 dengan kategori “baik”. Pengeluaran ini biasanya untuk pembayaran kredit sepeda motor, kredit barang-barang elektronik, membeli pakaian anggota keluarga, dan kebutuhan lainnya. Pasar yang diadakan setelah hari panen juga mempengaruhi jumlah pengeluaran rumah tangga petani, karena pada saat itu keuangan rumah tangga petani sedang banyak-banyaknya.

Disampaikan pada Seminar Nasional “Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan”, November 2013

Indikator pemenuhan 14 kebutuhan dasar mendapatkan skor 4,17 dengan kategori “sangat berperan”. Skor ini menjelaskan bahwa hampir semua petani kelapa sawit sudah berada pada taraf sejahtera yang diukur menurut indikator dari BPS (Badan Pusat Statistik). Petani di daerah penelitian memiliki rumah rata-rata rumah beton/setengah beton, dengan luas bangunan per anggota keluarga lebih dari 8 m².

Kelembagaan

Kelembagaan yaitu sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur sendiri. Proses manajerial dalam kelembagaan pemerintahan desa sebagai sebuah organisasi menuntut lebih banyak kecakapan dan sumber daya manajerial yang menuntut digunakannya seperangkat kecakapan baru yaitu membuat mampu (*enabling*), memperlancar (*facilitating*), berkonsultasi (*consulting*), bekerjasama (*collaborating*), membimbing (*mentoring*), dan mendukung (*supporting*) (Stewart dalam Rosnita, 2011).

Tabel 3. Kelembagaan

No	Kelembagaan (Y3)	Rata-rata	Kategori
1	Kelembagaan memiliki tujuan yang jelas	3,87	Berperan(B)
2	Tujuan kelompok kelembagaan tercapai	3,69	Berperan(B)
3	Kelembagaan memiliki struktur yang jelas	3,72	Berperan(B)
4	Kelompok tani memiliki RDK dan RDKK	3,52	Berperan(B)
5	RDK dan RDKK bisa dilaksanakan	2,95	Cukup Berperan(C)
6	Kelembagaan mampu melaksanakan subsistem agribisnis dengan baik	3,39	Cukup Berperan(C)
7	Kelompok mampu menjadi usaha ekonomi di desa	3,39	Cukup Berperan(C)
Kelembagaan (Y3)		3,50	Berperan(B)

Sumber : Data Olahan, 2013

Tabel 3 menerangkan bahwa nilai skor yang diperoleh dari variabel kelembagaan mendapatkan skor 3,50 dengan kategori “berperan”. Hal ini menunjukkan bahwa keberdayaan petani dilihat dari kelembagaan di daerah penelitian telah mengalami peningkatan. Variabel kelembagaan di atas dinilai dari beberapa indikator yaitu kelembagaan memiliki tujuan yang jelas, tujuan kelompok kelembagaan tercapai, kelembagaan memiliki struktur yang jelas, kelompok tani memiliki RDK dan RDKK, RDK dan RDKK bisa dilaksanakan, kelembagaan mampu melaksanakan subsistem agribisnis dengan baik, dan kelompok mampu menjadi usaha ekonomi di desa.

Indikator kelembagaan memiliki tujuan yang jelas mendapatkan skor 3,87 dengan kategori “baik”. Skor ini menjelaskan bahwa kelembagaan yang dibangun petani benar-benar memiliki tujuan yang jelas, semua anggota kelompok tani

Disampaikan pada Seminar Nasional “Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan”, November 2013

memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan suasana kekeluargaan demi terlaksananya tujuan bersama.

Indikator tujuan kelompok kelembagaan tercapai mendapatkan skor 3,69 dengan kategori “baik”. Skor ini menjelaskan bahwa tujuan kelompok kelembagaan tercapai, tujuan disini adalah rencana definitif kebutuhan (RDK) dan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Dimana RDK terlaksana, sedangkan untuk RDKK tidak terlaksana.

Indikator kelembagaan memiliki struktur yang jelas mendapatkan skor 3,72 dengan kategori “baik”. Skor ini menjelaskan bahwa struktur dan pengurus kelompok tani terstruktur dengan jelas dan pembagian tugas kerja terorganisir dengan sangat baik, tetapi untuk Desa Sekijang pembagian tugas mereka kadang-kadang tidak jelas karena kelompok tani lebih dominan di jalankan oleh ketua kelompok saja.

Indikator kelompok tani memiliki RDK dan RDKK mendapatkan skor 3,52 dengan kategori “baik”. Skor ini menjelaskan bahwa kelompok tani memiliki rencana definitif kebutuhan (RDK) dan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). RDK dan RDKK yang ada biasanya dibuat oleh penyuluh dengan permintaan dari petani untuk memenuhi kebutuhan usaha tani mereka.

Indikator RDK dan RDKK bisa dilaksanakan mendapatkan skor 2,95 dengan kategori “cukup baik”. Skor ini menjelaskan bahwa RDK dan RDKK sulit dilaksanakan. RDK dalam kelompok tani biasanya terlaksana dengan baik, sedangkan untuk RDKK sangat sulit terlaksana. Hal ini karena untuk menebus RDKK dibutuhkan modal yang besar dan saprodi yang diajukan harus dibayar dimuka sebelum saprodi itu sampai ke tangan petani. Belum lagi sifat RDKK yang harus kontiniu setiap tahunnya.

Indikator kelembagaan mampu melaksanakan subsistem agribisnis dengan baik mendapatkan skor 3,39 dengan kategori “cukup baik”. Skor ini menjelaskan kemampuan kelembagaan petani dalam menerapkan lima subsistem agribisnis (subsistem agribisnis hulu/pengadaan input produksi (*off-farm*), subsistem produksi (*on-farm*), subsistem agroindustri, subsistem pemasaran hasil produksi, dan subsistem lembaga penunjang (koperasi, pemerintah, peneliti, bank, dll)). Dari kelima subsistem agribisnis petani sering mengalami kesulitan pada subsistem pemasaran hasil produksi, petani masih kesulitan memasarkan hasil produksi kelapa sawit, karet, hasil panen ikan air kolam, dan hasil pertanian lainnya. Kelangkaan pupuk juga menjadi masalah bagi petani.

Indikator kelompok mampu menjadi usaha ekonomi di desa mendapatkan skor 3,39 dengan kategori “baik”. Skor ini menjelaskan bahwa kelompok tani telah mampu membentuk usaha, yaitu usaha simpan pinjam yang dapat dimanfaatkan oleh setiap anggota kelompok tani yang membutuhkan.

Tabel 4. Keberdayaan

No	Keberdayaan (Y)	Rata-rata	Kategori
1	Sumber Daya Manusia (Y1)	3,46	Baik(B)
2	Ekonomi Produktif (Y2)	3,65	Baik(B)
3	Kelembagaan (Y3)	3,50	Baik(B)
	Keberdayaan (Y)	3,54	Baik(B)

Sumber : Data Olahan, 2013

Disampaikan pada Seminar Nasional “Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan”, November 2013

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai skor keberdayaan yang diperoleh dari masing-masing variabel yang diukur mendapatkan skor 3,54 dengan kategori "baik". Artinya, secara keseluruhan petani yang mempunyai tingkat keberdayaan yang cukup baik dari aspek sumberdaya manusia, ekonomi produktif, dan kelembagaan yang dimiliki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat keberdayaan petani kelapa sawit pola swadaya di Propinsi Riau masuk kategori baik, dengan kondisi sumberdaya manusia (SDM) yang baik, memiliki usaha ekonomi produktif, dan kelembagaan yang baik.

Walaupun tingkat keberdayaan petani sawit swadaya di Propinsi Riau sudah masuk kategori baik, namun pembinaan melalui kegiatan penyuluhan harus ditingkatkan untuk mencapai produktivitas usahatani dan dalam menghadapi RSPO.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, A. 2002. Teknik Penyusunan Skala Pengukur. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah mada. Yogyakarta
- Dinas Perkebunan Propinsi Riau. 2012. Statistik Perkebunan Propinsi riau 2011.
- Faisal, S. 2005. Format-Format Penelitian Sosial. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hidayat dan Bahri,S. 2001. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Sebuah Rekonstruksi Konsep *Community Based Development* (CBD). Pustaka Quantum. Jakarta
- Nazir. Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Riduwan. 2002. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Alfabeta. Bandung
- Rosnita. Yulida R. Arifudin. 2012. Tingkat Keberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Peningkatan Produksi Kelapa Sawit Di Provinsi Riau. Seminar Nasional Dan Rapat Tahunan (SEMIRATA) BKS-PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pertanian Di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Pada Tanggal 3 April 2012.
- Sudradjat, M.S. 2002. Metode Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala. Bandung: Jatinangor
- Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung
- Sumarjo. 2011. Model pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan konflik sosial pada perkebunan kelapa sawit di propinsi riau. Disampaikan dalam semiloka pengelolaan terpadu lingkungan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Propinsi Riau
- Sumodiningrat, G.1999. Pemberdayaan Masyarakat. Gramedia. Jakarta
- Syahyuti. 2003. Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor
- Syahza, A. 2011. *The Institutional Arrangements in the Palm Oil Sector: Effort to Spur Economic Growth in Rural Areas. International of Research Journal*. Vol 4 no.3.
- TKP4 Provinsi Riau. 2006. Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD). Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau

Disampaikan pada Seminar Nasional "Peranan Teknologi dan Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan", November 2013